Data PBI Harus Valid

SEMENTARA itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak Mujiono meminta Dinas Sosial harus betul-betul melakukan pendataan untuk PBI agar tidak ada salah sasaran dalam pembayaran premi JKN-KIS bagi masyarakat miskin. Selain itu juga guna

• Baca Halaman 15

meminimalisir data ganda bagi penerima program bantuan sosial ini.

Menurut Mujiono masih ada PBI yang belum valid yang kemudian membuat pengusulan penerima PBI dari APBD provinsi belum bisa direalisasikan.

Meski demikian alokasi anggaran itu sudah masuk dalam APBD Kota Pontianak. Nilai yang alokasikan mencapai Rp2,5 miliar. Jumlah yang usulkan sebanyak 25 ribu PBI, dimana dari usulan itu ada 13 ribu PBI yang ganda.

Bahkan dari data itu ada peserta yang tidak layak masuk PBI. Seperti berstatuskan PBI dari pemerintah pusat, pensiunan, pegawai BUMN, ASN hingga anggota dewan.

"Data itu harus tuntas agar tidak ada lagi yang ganda dan yang tidak masuk PBI sementara mereka masuk dalam kriteria itu," ucapnya.

Proses validasi dilanjutkan Mujiono perlu melibatkan Dinas Kesehatan, Bappeda dan BPJS. Keterlibatan BPJS untuk melihat peserta JKN-KIS yang menunggak pembayaran premi karena ketidakmampuan membayar. Ia juga menyarankan peserta yang menunggak juga dimasukkan dalam PBI APBD Provinsi.

"Artinya jika warga Pontianak, awalnya kategori mandiri kemudian menunggak dan bertahun-tahun tak membayar maka dialihkan masuk subsidi," kata dia.

Pengusulan itu karena masih 13 ribu kuota PBI dari APBD provinsi. Belum lagi dengan penambahan 2 ribu PBI yang menggunakan anggaran dari APBD Kota Pontianak. Artinya mereka bisa saja masuk apakah disubsidi di APBD Provinsi atau Kota.

"Anggarannya ada cuma data yang harus valid sehingga dinas sosial harus lebih aktif mendata," pungkasnya. **(din)**